

## 1. Buku-Buku

Anonim, 1993, *Komentar atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung

Boedi Harsono, 1971, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjurusan, Isi dan Pelaksanaannya Djambatan*, Jakarta

Boedi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta

Erna Sri Wibawanti, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta

Efendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta

Hilman Hadikusumo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung

I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta

Juliyansah Noo, 2013, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang

Rusdi Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lanarka Publisher, Yogyakarta

Rozaki, Abdur, dkk, 2005, *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*, IRE PRESS Yogyakarta

Sudargo Gautama, 1981, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung

Soedikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta

Supriadi, *Hukum Agraria*, 2010 Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta

## **2. Jurnal**

Merry Yono, 1995, *Eksistensi Tanah Bengkok Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Adat di Kabupaten Dati II Sokoharjo*, Progam Pascasarjana USU, Medan

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan.

Surat Kakanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 13 Februari 1999, perihal Penertiban tanah-tanah Swapraja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **4. Surat Kabar/Tabloid/Majalah/Buletin**

Sri Winarsi, *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Daerah*, Majalah YURIDIKA, Vol. 20 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, September 2005.

## 5. Data Elektronik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, 10 oktober 2016, 19:59.

<http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/270/213>, 2 november 2016, 10:37 WIB.

<https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian-tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/>, 16 november 2016, 14:36.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_bangkok](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bangkok), 30 November 2016

## 6. Sumber Lain

Wawancara dengan Eka. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Wawancara dengan Yulia. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Wawancara dengan Julaidi Rastiyanto. Pembantu Pertanahan Paniti Kismo.

